

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI LAMPUNG

Nadhifa Ramadanisa¹, Nunuk Triwahyuningtyas²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: nadhifa.r@upnvj.ac.id¹, nunuk.triwahyuningtyas@upnvj.ac.id²

ABSTRAK

Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang utama masuk ke Pulau Sumatera, namun hal tersebut tidak menjadikan tingkat IPM Provinsi Lampung lebih baik dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera. IPM di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendapatan perkapita, dan kemiskinan. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 15 kab/kota di Provinsi Lampung periode 2015-2019, sehingga model regresi data panel adalah metode yang digunakan pada penelitian ini, dengan model yang terpilih yaitu Fixed Effect Model (FEM). Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 1) pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Lampung, 2) pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Lampung, 3) pendapatan perkapita berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Lampung, 4) kemiskinan tidak berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: IPM, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendapatan Perkapita, Kemiskinan

ABSTRACT

Lampung Province has the lowest Human Development Index (HDI) among other provinces on the island of Sumatra. Lampung Province is the main gateway to Sumatra Island, but this does not make Lampung Province's HDI level better than other provinces on Sumatra Island. The research was conducted to find out how the influence of government spending in the education sektor, government spending in the health sektor, per capita income, and poverty on HDI in Lampung Province. The data used in this study are 15 districts/cities in Lampung Province for the 2015-2019 period, so the panel data regression model is the method used in this study, with the model chosen namely the Fixed Effect Model (FEM). This study shows the results that 1) government spending in the education sektor affects HDI in Lampung Province, 2) government spending in the health sektor does not affect HDI in Lampung Province, 3) income per capita affects HDI in Lampung Province, 4) poverty has no effect on HDI in Lampung Province.

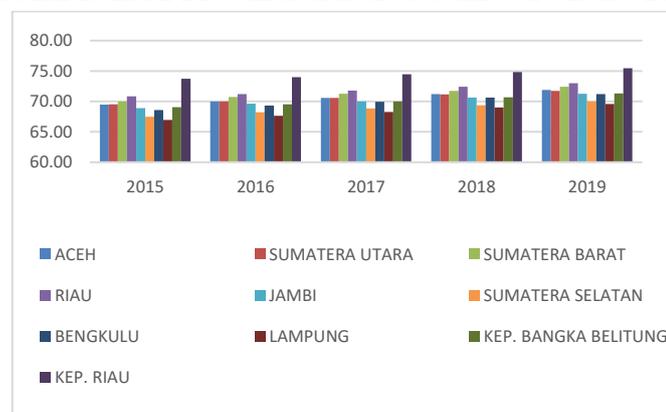
Keywords: HDI, Education Sektor Government Expenditures, Health Sektor Government Expenditures, Per capita Income, Poverty

PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang dipakai untuk mengukur kemajuan pembangunan kualitas hidup manusia sebagaimana yang diungkapkan dalam teori *human capital* oleh Gary S Becker jika manusia bukan hanya sumber daya tetapi dapat berbentuk modal. Modal manusia sangat penting, yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, atau dengan adanya kebiasaan baik

yang terus bertambah di kehidupan untuk menunjang produktivitasnya. Teori *human capital* ini didukung pula oleh teori lingkaran setan kemiskinan menurut Nurkse pada tahun 1953 yaitu tingginya angka kemiskinan disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, yang menyebabkan penurunan investasi publik di sektor pendidikan dan kesehatan, yang dapat menghambat proses peningkatan IPM hingga dapat menyebabkan produktivitas yang rendah dan meningkatnya angka kemiskinan. Provinsi Lampung merupakan satu dari sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera yang terdiri dari 13 Kabupaten dan 2 Kota, sehingga dapat memberikan grafik pembangunan manusia yang bervariasi. Menurut BPS (2019) pada tahun 2019 Provinsi Lampung memiliki tingkat IPM paling rendah yang menempati urutan 10 diantara provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Seperti yang dapat dilihat pada grafik 1 berikut:

Grafik 1. IPM Provinsi di Pulau Sumatera 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2021

Grafik 1 menunjukkan, perkembangan IPM di Provinsi Lampung terus meningkat terlihat dari meningkatnya persentase angka IPM secara konsisten dari tahun 2015-2019. Angka IPM Lampung sendiri pada tahun 2019 mencapai 69,57. Namun demikian, peningkatan tersebut masih berada dibawah capaian IPM provinsi lain di Pulau Sumatera. Angka tersebut belum cukup kuat untuk meningkatkan peringkat IPM Provinsi Lampung kepada posisi yang diharapkan, yang artinya hal ini masih membuat kondisi pembangunan manusia di Provinsi Lampung tertinggal dari provinsi lainnya di pulau Sumatera yang mengindikasikan bahwa belum meratanya pembangunan dan investasi publik dalam sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan kesejahteraan di Provinsi Lampung.

IPM di Provinsi Lampung tidak seharusnya lebih kecil dari provinsi lain di Pulau Sumatera. Lokasinya yang strategis berdekatan dengan ibu kota provinsi DKI Jakarta menjadikan Lampung sebagai provinsi paling strategis di Sumatera, dan Lampung merupakan gerbang utama masuk ke Pulau Sumatera. Melalui peran distribusi pemerintah dalam memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, seharusnya pemerintah lebih optimal dalam pemerataan sumber-sumber ekonomi di Provinsi Lampung (Salman & Rasyidin, 2020).

Beberapa penelitian mencoba melihat Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Pendapatan Perkapita, dan Kemiskinan terhadap IPM. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya adalah yang dilakukan oleh Julita Senewe, dkk (2021), M.B Nani Ariani dan Indri Arrafi Juliannisa (2021), Desmintari dan Lina Ariyani (2019), Sal Diba Susen Pake, dkk(2018), Novita Dewi (2017), Agus Tri Basuki dan Endah Saptutyingsih (2016), Anisa Fahmi dan Khairul Amri Dalimunthe (2018), Lailan Syafrina Hasibuan, dkk (2020). Menyatakan bahwa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian memiliki pengaruh baik secara positif maupun negatif terhadap variabel terikat, yaitu IPM. Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukannya penelitian mendalam yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan penambahan literatur penelitian untuk meningkatkan IPM di Kab/Kota Provinsi Lampung. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pengaruh Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendapatan perkapita, dan kemiskinan terhadap IPM di Provinsi Lampung

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Utama

Teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh Becker, menyatakan jika manusia bukan sekedar sumber daya tetapi dapat berbentuk modal. Modal manusia sangat penting yang dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek pendapatan, kesehatan, pendidikan, atau dengan adanya kebiasaan baik yang terus bertambah di kehidupan untuk menunjang produktivitasnya. Beberapa hal tersebut dapat disebut sebagai modal manusia dikarenakan manusia tidak dapat terpisahkan oleh pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan juga nilai-nilai lain yang berhubungan dengan keuangan dan fisik mereka. Menurut Becker, Modal manusia mengacu pada cadangan keterampilan dan pengetahuan produksi manusia melalui kesehatan dan pendidikan. Tingginya tingkat pendidikan dan kesehatan seseorang, menggambarkan semakin tingginya modal manusia yang diharapkan. Maka dari itu, Investasi pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan kualitas SDM, hal ini guna semua lapisan masyarakat mendapatkan hak yang sama, karena pada implementasinya, masyarakat miskin tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan karna pendapatan yang mereka peroleh difokuskan untuk kebutuhan pangan (Becker, 1993).

Teori Kemiskinan

Teori lingkaran kemiskinan oleh Nurkse menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan kesehatan memiliki keterkaitan terhadap tingkat kemiskinan dua hal tersebut merupakan investasi penting untuk menunjang produktivitas manusia yang disebabkan oleh keterbelakangan ekonomi, dan akan menjadikan masyarakat menjadi kurang produktif maka pendapatan yang mereka terima rendah yang akan berdampak pada kesejahteraan hidup mereka. Sejalan dengan teori *human capital* oleh Becker (1993), bahwa peningkatan

pendidikan dan kesehatan dapat didukung dengan adanya investasi dari pemerintah untuk membantu mereka yang berlatar belakang memiliki penghasilan yang rendah untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendorong mobilitas ke atas untuk masyarakat miskin menciptakan mobilitas kebawah untuk mereka yang memiliki pendapatan yang lebih baik.

Teori IPM

United Nations Development Program (UNDP) mengartikan *Human Development Improvement Program* atau Program Peningkatan Pembangunan Manusia merupakan proses pengembangan jangkauan pilihan penduduk, yang berarti mereka memiliki lebih banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi dan budaya. Pertimbangan akan tiga hal itu penting dalam pilihan yang dibuat manusia, yaitu memiliki umur panjang yang sehat untuk belajar dan memiliki pekerjaan untuk menciptakan pendapatan yang layak untuk memperoleh standar hidup yang layak, yang dapat diukur dari angka 0 hingga 100 (UNDP, 2020).

Teori Pengeluaran Pemerintah

Sejalan dengan teori *human capital*, Musgrave (1993) mengemukakan bahwa kegiatan ekonomi yang bersifat kolektif publik dan/atau kegiatan nirlaba tidak dapat dilakukan oleh pasar. Kegagalan pasar, berlawanan dengan tiga peran pemerintah, yaitu peran distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana pada sektor kesehatan dan pendidikan yang belum menyentuh pasar. Investasi publik pada sektor kesehatan dan pendidikan memberikan kesempatan yang lebih merata bagi masyarakat dalam pelayanan kesehatan serta pendidikan, sehingga mampu melakukan peningkatan pada SDM yang andal dan sehat. Peningkatan kesehatan serta pendidikan dapat meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

Teori Pendapatan Perkapita

Menurut Musgrave (1993), pendapatan perkapita didapatkan dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk sebagai hasil dari kegiatan perekonomian suatu daerah. Suatu daerah dapat melihat perkembangan perekonomian daerahnya melalui pendapatan perkapita, yang dimana semakin sejahtera masyarakat di daerah tersebut mengartikan bahwa masyarakat tersebut mampu untuk membiayai pengeluaran hariannya.

Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPM

Realisasi belanja pemerintah di sektor pendidikan merupakan investasi nyata untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Sejalan dengan teori *human capital* yang menyatakan bantuan pemerintah mempunyai peran yang penting utamanya untuk masyarakat miskin karna setiap orang akan dapat meraih pendidikan yang layak, kesempatan

yang sama dalam pendidikan, yang akan mendorong peningkatan kualitas SDM. Teori tersebut diperkuat melalui penelitian yang dilakukan oleh Anisa Fahmi,dkk (2018), Johan Beni Maharda,dkk (2020), Julita Senewe,dkk (2021), dan Merita Pahlevi (2017) bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh terhadap IPM.

Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap IPM

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap orang, tanpa kesehatan manusia tidak mungkin dapat mendatangkan produktivitas ke daerah. Hal ini sejalan dengan teori *human capital* yaitu jika setiap penduduk memiliki jaminan kesehatan, maka kegiatan ekonomi di daerah tersebut akan terlaksana. Kualitas SDM yang ditinggi mencerminkan derajat kesehatan seseorang yang tinggi pula sehingga akan berdampak pada peningkatan pembangunan manusia. Maka dari itu, peran pemerintah dalam alokasi anggaran dibidang kesehatan sangat diperlukan. Teori tersebut diperkuat dengan adanya penelitian dari Julita Senewe, dkk (2021), Sal Diba Susen Pake, dkk (2018), Anisa Fahmi,dkk (2018), M.Zahari MS,dkk (2017), dan Merita Pahlevi (2017) bahwa pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan memiliki pengaruh terhadap IPM.

Hubungan Pendapatan Perkapita Terhadap IPM

Peningkatan pendapatan perkapita menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan perbaikan pembangunan ekonomi. Produktivitas perkapita bisa ditingkatkan dengan meningkatkan peralatan permodalan dan meningkatkan keterampilan sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat IPM. Pendapatan perkapita pada penelitian ini digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Hal ini sejalan dengan teori *human capital* yaitu pendapatan seseorang akan diperkapita setiap tahunnya untuk melihat produktivitas masyarakat. Teori tersebut di perkuat dengan adanya penelitian dari Anisa Fahmi, dkk (2018), Niken Sulistyowati,dkk (2017) bahwa Pendapatan perkapita berpengaruh terhadap IPM.

Hubungan Kemiskinan Terhadap IPM

Teori lingkaran kemiskinan memiliki tiga faktor penyebab seseorang menjadi miskin yaitu kesehatan rendah, penghasilan rendah dan pendidikan rendah. Pada hal diatas, kemiskinan memiliki dampak penting bagi pembangunan manusia. Kualitas SDM yang rendah sebagai salah satu dampak akibat kegagalan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, Maka dari itu dibutuhkan peran pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di setiap wilayah (Ariani & Juliannisa, 2021).

Hal ini sejalan dengan teori *human capital* mengenai kesejahteraan masyarakat dan produktivitas manusia yang selanjutnya diperkuat oleh teori lingkaran kemiskinan yaitu kemiskinan hadir dari adanya keterbelakangan ekonomi sehingga masyarakat tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan, dan kesehatan sehingga menyebabkan produktivitas manusia berkurang dan berdampak pada perkembangan pembangunan manusia. Teori

tersebut diperkuat dengan adanya penelitian dari Novita Dewi (2017), Sulistyowati et al (2017) bahwa Pendapatan perkapita berpengaruh terhadap IPM.

METODOLOGI PENELITIAN

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Rumus Perhitungan	Skala Pengukuran
Indeks Pembangunan Manusia (Y)	Tingkat IPM di Lampung	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran} \times 100}$	Rasio
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X ₁)	Rekapitulasi DAK pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Lampung	Rekapitulasi DAK Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	Nominal
Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X ₂)	Rekapitulasi DAK pengeluaran pemerintah sektor kesehatan di Lampung	Rekapitulasi DAK Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan	Nominal
Pendapatan Perkapita (X ₃)	Rekapitulasi PDRB Perkapita berdasarkan pengeluaran atas dasar harga berlaku di Lampung	$PKP = \frac{PDRB}{\text{Jumlah Penduduk}}$	Nominal
Kemiskinan (X ₄)	persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis	$P_a = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^a$	Rasio

kemiskinan
di Lampung

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian populasi yang digunakan ialah IPM, Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan, Pendapatan Perkapita, dan Kemiskinan pada 15 Kab/Kota di Provinsi Lampung. dengan sampel penelitian menggunakan data tahun 2015-2019, maka jumlah sampel secara keseluruhan menjadi 75 data.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan data sekunder, yang didapatkan secara tidak langsung dan sudah tersedia serta dipublikasikan oleh pihak lain untuk dijadikan objek penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa sumber data yang digunakan, yaitu data IPM, Pendapatan Perkapita, dan Kemiskinan yang di peroleh melalui publikasi yang dilakukan oleh BPS Kab/Kota Provinsi Lampung. Pengeluaran Pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan diperoleh dari publikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model regresi data panel. Dengan penentuan estimasi regresi model terpilih yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* melalui uji chow dan uji hausman, disamping itu uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Didapatkan model persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon$$

Dimana: Y= Indeks Pembangunan Manusia, β_0 = Konstanta, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi, X1= Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan, X2= Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan, X3= Pendapatan Perkapita, X4= Kemiskinan, i = *Cross Section* Kab/Kota Provinsi Lampung, t = *Time Series* dalam tahun 2015-2019, ε = *error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas

Jarque-Bera	0.283080
-------------	----------

<i>Probability</i>	0.868020
--------------------	----------

Sumber: Hasil Olah Data EViews 10

Hasil Uji Normalitas menunjukkan nilai Probabilitas $0.868020 > 0.05$, artinya bahwa data pada penelitian ini sudah terdistribusi normal dan terbebas dari masalah normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

	LN_PPSP	LN_PPSK	LN_PKP	KEM
LN_PPSP	1.000000	0.869110	0.473136	0.200254
LN_PPSK	0.869110	1.000000	0.347839	0.087625
LN_PKP	0.473136	0.347839	1.000000	-0.350851
KEM	0.200254	0.087625	-0.35085	1.000000

Sumber: Hasil Olah Data EViews 10

Hasil Uji Multikolinearitas menunjukkan hasil korelasi antarvariabel bebas kurang dari 0.90, artinya data pada penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variabel : RESABS

Method : Panel Least Squares

<i>Variabel</i>	<i>Prob.</i>
C	0.1054
LN_PPSP	0.1755
LN_PPSK	0.0601
LN_PKP	0.3977
KEM	0.1559

Sumber: Hasil Olah Data EViews 10

Hasil Uji Heteroskedastisitas menunjukkan nilai Probabilitas > 0.05 , artinya data pada penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

<i>Durbin-</i>	
<i>Watson stat</i>	1.082373

Sumber: Hasil Olah Data EViews 10

Hasil Uji Autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson diantara -2 dan +2 sebesar 1.082373, artinya data pada penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi.

Uji Hipotesis

Tabel 6. Fixed Effect Model Results

Var	Co	Std	t-	P
	-	12.	-	0
C	67.78816	45909	5.440862	.0000
LN	2.5	0.9	2.6	0
_PPSP	15708	63350	11417	.0116
LN	1.5	0.8	1.8	0
_PPSK	83203	48081	66807	.0672
LN	3.2	0.9	3.3	0
_PKP	16800	50524	84238	.0013
KE	-	0.1	-	0
M	0.040019	04097	0.384440	.7021

$$IPM_{it} = - 67.78816 + 2.515708PPSP + 1.583203PPSK + 3.216800PKP - 0.040019KEM$$

Uji Parsial

Pada penelitian ini, nilai $df = n - k$ yang dihasilkan sebesar $df = 75 - 4 = 71$ dengan tingkat signifikansi 0.05 sehingga didapatkan nilai t_{tabel} sebesar 1.993943, Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. H_0 : tidak berpengaruh jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, atau $sig > \alpha = 5\%$
2. H_a : berpengaruh jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, atau $sig < \alpha = 5\%$

Dari hasil di atas, dapat terlihat bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pendapatan Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Kemiskinan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM.

Uji Simultan

Uji ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan atau bersama-sama. dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

1. H_0 : tidak berpengaruh jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas $> 0,05$
2. H_a : berpengaruh jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas $< 0,05$

Tabel 7. Uji F

<i>F-statistic</i>	849.2725
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000

Sumber: Hasil Olah Data EViews 10

Nilai F_{tabel} ($df_1 = 3$, $df_2 = 71$) diperoleh sebesar 2.73, dengan demikian nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($849.2725 > 2.73$) dan probabilitas $0.000000 < 0.05$ mengartikan bahwa pengeluaran

pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendapatan perkapita, dan kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh terhadap IPM.

Uji Koefisien Determinasi R-Squared dan Adjusted R-Squared

Tabel 8.R-Squared dan Adjusted R-Squared

R-squared	0.99635
Adjusted R-squared	0.995177

Sumber: Hasil Olah Data EViews 10

Berdasarkan hasil olah data, diketahui nilai *R-Squared* sebesar 0.99635 yang berarti variabel dependen (IPM) dapat dijelaskan oleh variabel independen (pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendapatan perkapita, dan kemiskinan) sebesar 99,64% sedangkan sisanya 0.36% IPM dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0.995177 yang menandakan bahwa variabel dependen (IPM) dapat dijelaskan oleh variabel independen (pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendapatan perkapita, dan kemiskinan) sebesar 99,52% sedangkan sisanya 0.48% IPM dijelaskan oleh variabel lain atau sebab lain di luar penelitian.

Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPM

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan memiliki thitung $>$ ttabel (2.611417 $>$ 1.993943) dan probabilitas $0.0116 < 0.05$ menandakan secara statistik H_0 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Berhasilnya program pemerintah mengenai wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatnya program Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) juga membantu meningkatkan nilai IPM melalui peningkatan jumlah siswa yang mampu menyelesaikan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Becker (1993), Investasi pendidikan nyata diperlukan, pemerintah harus mampu membangun fasilitas baik sarana maupun prasarana serta sistem pendidikan yang baik. Investasi pemerintah memiliki peran yang penting karna setiap orang akan dapat memperoleh pendidikan yang layak dengan kesempatan yang sama, utamanya bagi masyarakat miskin yang akan mendapat pemerataan kesempatan yang akan mendorong peningkatan kualitas SDM.

Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap IPM

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan memiliki thitung $<$ ttabel (1.866807 $<$ 1.993943) dan probabilitas $0.0672 > 0.05$ menandakan secara statistik H_0 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan tidak berpengaruh

signifikan terhadap IPM. Dilihat dari hasil penelitian ini pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak memiliki pengaruh. Pertama, pengalokasian dana sektor pendidikan jauh lebih besar dibandingkan pengalokasian dana untuk kesehatan. Kedua, pengalokasian dana antar kab/kota satu dengan yang lain tidak merata. Ketiga, penggunaan dana alokasi pemerintah yang belum tepat sasaran di beberapa wilayah. Keempat, program pemerintah seperti Jamkesmas dan program layanan kesehatan gratis lainnya belum terlaksana secara optimal sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap IPM. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Johan Beni Maharda & Bunga Zharfa Aulia (2020), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Penyediaan kesehatan masyarakat yang tidak efisien memainkan peran penting dalam menghasilkan hasil tersebut

Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap IPM

Pendapatan Perkapita memiliki thitung $>$ ttabel ($3.384238 > 1.993943$) dan probabilitas $0.0013 < 0.05$ menandakan secara statistik H_0 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa Pendapatan Perkapita berpengaruh signifikan terhadap IPM. Pendapatan per kapita di Provinsi Lampung terus terjadi kenaikan, pendapatan per kapita sangat bergantung pada potensi SDA maupun SDM serta faktor produksi yang ada. Banyaknya penduduk dan pesatnya pembangunan infrastruktur yang didukung oleh melimpahnya sumber daya alam perkebunan, pertanian, hingga perikanan di Provinsi Lampung menjadikan Provinsi Lampung sebagai wilayah potensi Lumbung Pangan Nasional. Ketika pendapatan per kapita naik, maka kemampuan daya beli masyarakat dalam melengkapi kebutuhan sehari-hari menjadi lebih baik, dengan begitu kesejahteraan dapat meningkat. Diperkuat teori yang dikemukakan oleh Becker (1993), pendapatan perkapita merupakan cerminan dari kemampuan pendapatan masyarakat disuatu wilayah guna memenuhi kebutuhan minimum dan kebutuhan pokok. Rendahnya taraf hidup berkaitan erat dengan rendahnya pendapatan per kapita merupakan akibat dari rendahnya produktivitas masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan minimum masyarakat, dapat mengindikasikan kesejahteraan yang diperoleh dari indikator pemerataan pendapatan masyarakat di daerah. Meningkatnya kemampuan daya beli seseorang dapat terjadi apabila pendapatan per kapita tinggi, sehingga dalam hal ini membantu meningkatkan nilai IPM.

Analisis Pengaruh Kemiskinan Terhadap IPM

Kemiskinan memiliki thitung $<$ ttabel ($-0.384440 < 1.993943$) dan probabilitas $0.7021 > 0.05$ menandakan secara statistik H_0 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Belum terpenuhinya kemampuan seseorang dalam masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasar merupakan salah satu dampak tidak relevannya tingkat kemiskinan terhadap IPM. Disamping itu, banyaknya program pengentasan kemiskinan seperti PKH, Dana Desa tidak berjalan sesuai target dikarenakan program-program tersebut dibuat tanpa menghiraukan karakteristik masing-masing kab/kota karena selama ini masyarakat hanya dituntut untuk berpartisipasi pada tiap-

tiap program tanpa tanpa dilibatkan dalam tanggung jawab dalam pelaksanaannya, dan program tersebut dinilai berhasil hanya ketika program berlangsung dan ketika program tersebut berhenti maka pemerintah dan masyarakat juga ikut menyelesaikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pernah dicanangkan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailan Syafrina Hasibuan et al (2020) kemiskinan tidak berpengaruh terhadap IPM. Tidak berpengaruhnya variabel kemiskinan dalam jangka pendek disebabkan oleh meningkatnya harga barang yang berdampak pada rendahnya penguluran perkapita disaat kemiskinan menurun.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari keempat variabel independen yang telah diteliti terhadap IPM di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan memiliki pengaruh terhadap IPM mencerminkan bahwa pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota terus memperbaiki kualitas masyarakatnya melalui progam pembangunan kualitas manusia seperti perbaikan kualitas Pendidikan baik dari segi sarana parasarana maupun kualitas tenaga pendidik.
2. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan tidak memiliki pengaruh terhadap IPM dikarenakan pengeluaran sektor kesehatan antara kabupaten/kota satu dengan yang lainnya sangat timpang dan dalam pengalokasian dana nya belum dilakukan secara efektif dan efisien sehingga pengeluaran sektor kesehatan yang meningkat setiap tahunnya belum bisa dirasakan secara langsung terhadap peningkatan IPM.
3. Variabel Pendapatan perkapita memiliki pengaruh terhadap IPM mencerminkan pendapatan per kapita yang meningkat, maka kemampuan daya beli masyarakat dalam melengkapi kebutuhan sehari-hari menjadi lebih baik.
4. Variabel Kemiskinan tidak memiliki pengaruh terhadap IPM dikarenakan penurunan tingkat kemiskinan masih tidak merata terjadi baik di setiap tahun maupun diantara kab/kota Provinsi Lampung dan mempunyai beberapa outlier.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, M. . N., & Juliannisa, I. A. (2021). *Analisis Indikator komposit Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten*. 18(01), 1–12.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2019). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung 2019*. BPS Provinsi Lampung. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/960>.
- Becker, G. S. (1993). Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. In *Notes and Queries* (Vols. s1-IV, Issue 92). <https://doi.org/10.1093/nq/s1-IV.92.83-a>

- Farah Diffa Hanum, Sugianto, & Sri Murtatik. (2022). Determinasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(6), 941–950. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.111>
- Haris, T. S., & Tanpubolon, F. (2022). Pengaruh Penerapan Total Quality Management Terhadap Kinerja Operasi Pengrajin Mebel Di Kabupaten Konawe. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(4), 355–362.
- Hasibuan, L. S., Rujiman, & Sukardi. (2020). Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 5(2), 139–141. <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/470>
- Maharda, J. B., & Aulia, B. Z. (2020). Government Expenditure and Human Development in Indonesia. *Jambura Equilibrium Journal*, 2(2), 81–94. <https://doi.org/10.37479/jej.v2i2.6901>
- Salman, & Rasyidin. (2020). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(2), 130–143. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- Sulistiyowati, N., Sinaga, B. M., & Novindra, N. (2017). Impacts of Government and Household Expenditure on Human Development Index. *Jejak*, 10(2), 412–428. <https://doi.org/10.15294/jejak.v10i2.11305>
- UNDP. (2020). The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. In *Human Development Report 2020*. <http://hdr.undp.org/en/2020-report>

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI LAMPUNG**

Nadhifa Ramadanisa, Nunuk Triwahyuningtyas

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.121>

ISSN 2809-8544

